

RENCANA KERJA
KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PUNGGING
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pungging Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pungging Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, Desember 2023


AMSAR AZHARI SIREGAR, SH., MM.
Pembina
NIP. 19780610 199809 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan Capaian Renstra PD	22
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	25
2.4 Review terhadap RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	36
BAB III 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran renja Perangkat Daerah	37
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	50
BAB V Penutup	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja (Renja) Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Pungging yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Pungging adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pungging Tahun 2022 – 2026.

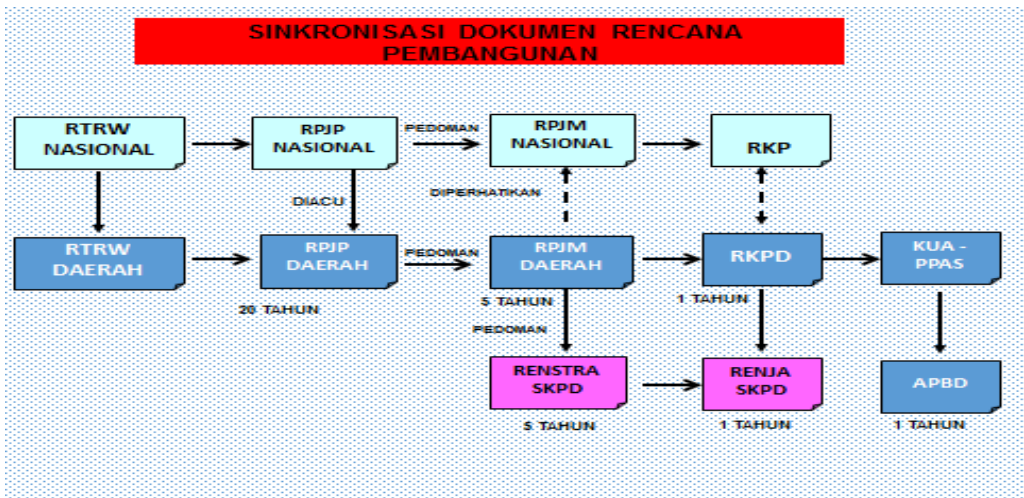
Sebagai dokumen perencanaan, Renja Kecamatan Pungging memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Renja perubahan yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Mengacu pada RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;

- 2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
- 3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- 4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1
Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
31. SK tim penyusunan renstra Kec. Pungging Nomor 188/7/416-306/2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 tahun yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah 5 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus untuk menyediakan acuan kesesuaian program dan kegiatan yang sangat strategis di Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.
2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program /kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.
3. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil.
4. Langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.
5. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2024 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja Kec. Pungging serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian

tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals)
- 4) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4. Review terhadap RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda. Sajian Tabel T-C.31 Review Terhadap RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
- b. Penjelasan penyesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah.

Sajian Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan

BAB III TUJUAN DAN DASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian SDGs, Pengentasan kemiskinan, pencapaian SPM,

pendayagunaan potensi ekonomi daerah, pengembangan daerah terisolir.

- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi : Jumlah program dan jumlah kegiatan, Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu) dan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.

Sajian Tabel TC-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan, pagu dana indikatif dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RENSTRA PD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja dan Rencana Tindaklanjut Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Pungging pada tahun 2022 pada umumnya tercapai dengan baik Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2022 diuraikan sebagaimana table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran pada Kecamatan Pungging Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.115.342.874	2.934.015.029	83,34	181.327.845
A.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.997.700	99,98	2.300
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000	7.497.700	99,97	2.300
B.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.286.290.000	2.136.492.585	93,44	149.797.415

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.286.290.000	2.136.492.585	93,44	149.797.415
C.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	23.800.000	99,17	200.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24.000.000	23.800.000	99,17	200.000
D.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.069.500	178.113.780	98,36	2.955.720
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.000.000	7.991.000	99,89	9.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.069.500	94.480.980	97,33	2.588.520
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	24.697.000	98,79	303.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.000.000	2.993.000	99,77	7.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100	0
	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	19.951.800	99,76	48.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000	25.000.000	100	0
E.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	390.000.000	364.530.000	93,47	25.470.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	390.000.000	364.530.000	93,47	25.470.000
F.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.660.871	47.483.522	97,58	1.177.349
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.256.391	34.079.042	96,66	1.177.349
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.404.480	13.404.480	100	0
G.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.322.503	168.597.442	98,98	1.725.061
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.100.000	26.218.000	96,75	882.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	140.222.503	139.379.442	99,40	843.061
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000	3.000.000	100	0
II.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	30.000.000	29.999.600	99,99	400
A.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	30.000.000	29.999.600	99,99	400
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	5.000.000	4.999.800	99,99	200
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait				200

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Sisa (Rp)
			(Rp)	(%)	
	dengan Pelayanan Non Perizinan	25.000.000	24.999.800	99,99	
V.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	301.008.000	292.845.800	97,28	8.162.200
A.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	301.008.000	292.845.800	97,28	8.162.200
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan desa	116.008.000	113.010.000	97,42	2.998.000
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	25.000.000	24.116.000	96,46	884.000
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.000.000	34.889.800	99,69	110.200
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	125.000.000	120.830.000	96,66	4.170.000
JUMLAH		3.446.350.874	3.256.860.429	94,50	189.490.445

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2023)

Kegiatan reviu evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C. 29) sebagai berikut :

Tabel 2.2 (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Provinsi : Jawa Timur Kabupaten : Mojokerto

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)		Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Di evaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)							
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12				13		14	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah																						
		1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.4	17,629,986,157	-	0	78	NULL	0	431,747,928	0	1,062,736,788	77.53	667,632,588	0	771,897,725	77.53	99.40%	2,934,015,029	-	77.53	2,934,015,029	-	-
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1Persentase Indikator program perangkat daerah yang tercapai sesuai target	100	113,299,720	100		100	NULL	27.67	4,150,000	18.96	2,845,000	12.52	1,879,000	40.83	6,123,700	99.98	99.98%	14,997,700	-	100	14,997,700	100	-
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat Tersusun sesuai Ketentuan yang berlaku	7	56,649,860	7	1E+07	7	7,500,000	2	2,210,000	2	1,285,000	2	1,129,000	1	2,876,000	7	100.00%	7,500,000	50.00%	7	17,500,000	100	142.85
		2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	6	56,649,860	6	1E+07	6	7,500,000	2	1,940,000	2	1,560,000	0	750,000	2	3,247,700	6	100.00%	7,497,700	0.02%	6	17,497,700	100	142.83
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.1Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	100	14,663,952,266	100		100	NULL	18.43	393,843,733	29.01	619,860,783	28.3	604,772,377	24.24	518,015,692	99.98	99.98%	2,136,492,585	-	100	2,136,492,585	100	-
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.1 Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	28	14,607,302,406	28	2.6E+09	28	2,286,290,000	7	393,843,733	7	619,860,783	7	604,772,377	7	518,015,692	28	100.00%	2,136,492,585	-	28	4,715,016,593	100	149.27
		3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.1Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	100	1,830,742,371	100		100	NULL	9.35	16,649,800	24.61	43,849,990	14.96	26,659,990	51.06	90,954,000	99.98	99.98%	178,113,780	-	100	178,113,780	100	-
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.1 Jumlah Jenis komponen instalasi Listrik / penerangan bangunn Kantor yang Disediakan : lampu TL, saklar, stopkontak dll	1	101,969,748	1	1.8E+07	1	8,000,000	0	1,745,000	0	4,251,000	0	0	1	1,995,000	1	100.00%	7,991,000	85.11%	1	25,991,000	100	117.87
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.1 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : Laptop, PC, LCD, Printer dll	1	1,048,974,303	1	1.9E+08	1	97,069,500	0	3,190,000	0	15,039,990	0	9,699,990	1	66,551,000	1	100.00%	94,480,980	209.96%	1	279,649,011	100	123.28
		3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.1 Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	198,274,510	12	3.5E+07	12	25,000,000	3	3,846,000	3	8,630,000	3	5,315,000	3	6,906,000	12	100.00%	24,697,000	-	12	59,697,000	100	139.23
		4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.1 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi dan foto copy	1	56,649,860	1	1E+07	1	3,000,000	0	824,000	0	674,000	0	891,000	1	604,000	1	100.00%	2,993,000	-	1	12,993,000	100	106.06
		5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.1 Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	56,649,860	12	1E+07	12	3,000,000	3	765,000	3	765,000	3	765,000	3	705,000	12	100.00%	3,000,000	-	12	13,000,000	100	106.12
		6. Penyediaan Bahan / Material	3.1 Jumlah Jenis ATK yang Disediakan: kertas, tinta, ballpoint, map dll	1	113,299,720	1	2E+07	1	20,000,000	0	3,179,800	0	6,590,000	0	3,989,000	1	6,193,000	1	100.00%	19,951,800	-	1	39,951,800	100	163.06
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.1 Jumlah Waktu Pemenuhan Biaya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	254,924,370	12	4.5E+07	12	25,000,000	3	3,100,000	3	7,900,000	3	6,000,000	3	8,000,000	12	100.00%	25,000,000	333.33%	12	70,000,000	100	126.98

	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai sesuai target	100	390,000,000	-	-	100	NULL	0.77	2,829,800	98.76	360,040,200	0	0	0.45	1,660,000	99.98	-	364,530,000	-	0	364,530,000	-	-	
	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.1Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terealisasi	11	390,000,000	11	3.9E+08	11	390,000,000	0	2,829,800	0	360,040,200	0	0	11	1,660,000	11	100.00%	364,530,000	-	11	754,530,000	-	-	
	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Kebutuhan	100	302,680,202	100		100	NULL	23.38	11,105,595	23	10,922,373	27.5	13,061,221	26.1	12,394,333	99.98	99.98%	47,483,522	-	100	47,483,522	100	-	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.1Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 bulan	12	226,744,010	12	4E+07	12	35,256,391	3	7,754,475	3	7,571,253	3	9,710,101	3	9,043,213	12	100.00%	34,079,042	85.20%	12	74,104,562	100	151.13	
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.1Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	1	75,936,192	1	1.3E+07	1	13,404,480	0	3,351,120	0	3,351,120	0	3,351,120	1	3,351,120	1	100.00%	13,404,480	-	1	26,808,960	100	163.26	
	6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.1Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100	618,049,973	100		100	NULL	1.87	3,169,000	14.95	25,218,442	12.6	21,260,000	70.55	118,950,000	99.97	99.97%	168,597,442	-	100	168,597,442	100	-	
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.1Jumlah Kendaraan dinas Operasional yang Dilakukan Penyediaan BBM, penggantian suku cadang dan Pemeliharaan rutin Lainnya selama 12 bulan	5	266,820,841	5	4.7E+07	5	27,100,000	0	0	0	0	3	18,668,000	2	7,550,000	5	100.00%	26,218,000	-	5	73,318,000	100	127.07	
	2. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.1Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara dan berfungsi dengan baik	2	277,584,314	2	4.9E+07	2	140,222,503	0	3,169,000	0	23,388,442	0	1,422,000	2	111,400,000	2	100.00%	139,379,442	-	2	188,379,442	100	313.82	
	3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.1Jumlah Jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	1	73,644,818	1	1.3E+07	1	3,000,000	0	0	0	1,830,000	1	1,170,000	0	0	1	100.00%	3,000,000	0.58%	1	16,000,000	100	100.47	
	7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.1IP ASN Perangkat Daerah	82	101,261,625	80		80	NULL	0	0	0	0	0	0	0	23,800,000	0	0.00%	23,800,000	-	80	23,800,000	97.56	-	
	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7.1Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas PNS serta Perlengkapannya	25	44,611,765	25	7875000	20	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20	23,800,000	20	80.00%	23,800,000	-	25	31,675,000	100	328.33
		IKM Kecamatan																							
	2	Terwujudnya Pelayanan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.1 Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	85	250,000,000	100	0	100	NULL	30.08	9,025,000	34.46	10,339,600	24.91	7,474,000	10.53	3,161,000	99.98	99.98%	29,999,600	-	199.98	29,999,600	199.98
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			1.1Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	300	250,000,000	300		3600	NULL	904	9,025,000	1201	10,339,600	955	7,474,000	540	3,161,000	3,600.00	1,200.00%	29,999,600	-	300	29,999,600	100	-
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1.1Jumlah Pelayanan Perizinan Non Usaha yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	10	67,275,265	10	1E+07	10	5,000,000	4	2,231,000	1	678,800	5	2,090,000	0	0	10	100.00%	4,999,800	8.06%	10	14,999,800	100	94.92
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			1.1Jumlah Pelayanan NonPerizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1450	182,724,735	290	3E+07	3590	25,000,000	900	6,794,000	1200	9,660,800	950	5,384,000	540	3,161,000	3,590.00	1,237.93%	24,999,800	-	290	54,999,800	100	124.44
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.2 Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85	420,000,000	-	0	82	NULL	15.02	45,219,000	12.74	38,356,000	24.33	73,250,000	45.18	136,020,800	97.27	118.62%	292,845,800	-	97.27	292,845,800	-	-
1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			1.1Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	76	1,900,000,000	19		76	NULL	19	45,219,000	19	38,356,000	19	73,250,000	19	136,020,800	76	400.00%	292,845,800	-	19	292,845,800	100	-
1. Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1.1Jumlah Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19	385,679,947	19	7E+07	19	116,008,000	4	4,821,000	5	9,619,000	4	3,010,000	6	95,560,000	19	100.00%	113,010,000	-	19	183,010,000	100	210.11
2. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			1.1Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19	254,925,375	19	4.5E+07	19	25,000,000	4	13,734,000	3	2,772,000	7	5,912,000	5	1,698,000	19	100.00%	24,116,000	-	19	69,116,000	100	119.97
3. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1.1Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19	316,290,646	19	5.5E+07	19	35,000,000	4	7,657,000	5	10,798,000	5	9,320,000	5	7,114,800	19	100.00%	34,889,800	1.41%	19	89,889,800	100	124.68
4. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			1.1Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	19	943,104,032	19	1.7E+08	19	125,000,000	7	19,007,000	6	15,167,000	3	55,008,000	3	31,648,000	19	100.00%	120,830,000	671.28%	19	290,830,000	100	143.13
Rata - rata capaian kinerja (%) :																	91.59								
Predikat kinerja :																	Sangat Tinggi								

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2023)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pungging

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan

suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 2021-2026
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pungging
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Standart Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2025 (n+1)	Tahun 2022 (n-2)	Tahun 2023 (n-1)	Tahun 2024 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	6	7		8	9	10	11	12	13
1	IKM Kecamatan	-	-	80,00	80,50	90,25	90,50	86,20	90,12	90,25	90,50	Baik
3	IKM Kecamatan	-	-	80,00	80,50	90,25	90,50	86,20	90,12	90,25	90,50	Baik

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pungging

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pungging tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh SDM dan Sarana prasarana.

Adanya pertimbangan terkait isu-isu penting ini dilakukan agar selalu ada perbaikan ke depannya sehingga Kecamatan Pungging dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan maksimal sehingga tujuan Kecamatan Pungging dalam mendukung visi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto periode tahun 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”*** pada misi ke tiga yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan”*** dapat terwujud dengan maksimal pula.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pungging antara lain :

1. Kurangnya pengawasan berbasis kinerja hingga menyebabkan tidak meratanya pembagian tugas;
2. Kurang meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis pelayanan yang dilayani oleh kecamatan.
3. Belum memadainya kompetensi beberapa SDM yang ada.

2.4. Reviu terhadap RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2022-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C.31) sebagai berikut :

Tabel 2.5
(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Review Terhadap RKPD Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pungging	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	2.626.195.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pungging	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	2.626.195.000	
			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	0			Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi serta berkelanjutan	1 Inovasi	0	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	15.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target	100%	15.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	7.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	7.500.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	7.500.000	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,18%	2.177.565.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,18%	2.177.565.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.177.565.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	2.177.565.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	15.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		IP ASN Perangkat Daerah	81	15.000.000	
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	15.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	15.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	217.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	217.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	15.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	68.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	68.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	30.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	20.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.000.000	
	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	30.000.000	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	30.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100%	10.000.000				100%	10.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	10.000.000				2 paket	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	91.404.480	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan	100%	91.404.480	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	78.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 laporan	78.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	13.404.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	13.404.480	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100.225.520	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100%	100.225.520	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	42.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 unit	42.900.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	37.325.520	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	37.325.520	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	20.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 unit	20.000.000	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pungging	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	40.000.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Pungging	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	40.000.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	850 Pelayanan	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang		Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	850 Pelayanan	40.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Dilimpahkan kepada Camat					
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	7 laporan	40.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	7 laporan	40.000.000	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pungging	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	245.400.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Pungging	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	245.400.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 Fasilitasi	245.400.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	23 Fasilitasi	245.400.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	40.000.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	40.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	5 dokumen	30.000.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan	5 dokumen	30.000.000	

NO	RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daerah dengan Pembangunan Desa		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Daerah dengan Pembangunan Desa		Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	50.400.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 dokumen	50.400.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	125.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5 dokumen	125.000.000	
					2.911.595.000					2.911.595.000	

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 membutuhkan adanya usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Program/kegiatan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang telah diperoleh melalui mekanisme usulan dan penelitian dalam Musrenbang. Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

1. Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;
2. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;
3. Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing Perangkat Daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2024 adalah sebagaimana tabel 2.6 (T-C. 32) berikut :

Tabel 2.6
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2024
Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Pungging

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL	-	-	-	-

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2023)

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pungging ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Terwujudnya pelayanan publik yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		IKM Kecamatan	90,25	90,50	90,75
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	90,25	90,50	90,75

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Kecamatan Pungging yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Kecamatan Pungging Tahun 2024. Renja Kecamatan Pungging merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Pungging.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pungging Tahun 2024 mengacu pada Tujuan Kecamatan Pungging yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pungging untuk 5 Tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dari Kecamatan Pungging Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH:

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

- a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat
 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 serta Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana tabel 3.2 (T-C.33) sebagai berikut :

Table 3.2 (Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pungging

Ko de	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Cat ata n Pen tin g	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lok asi	Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Su mber Da na		Targ et Capa ian Kine rja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Unsur Kewilayahan								
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Ke c. Pu ngg ing	81	2.626.195.0 00			81,1 0	3.812.452.6 93
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inov asi				1 Inov asi	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target		100 %	15.000.000			100 %	24.500.860
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 doku men	7.500.000			7 doku men	12.250.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21 Lapo ran	7.500.000			21 Lapo ran	12.250.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		93,1 8%	2.177.565.0 00			93,2 0%	3.171.053.2 16
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		17 oran g/bu lan	2.177.565.00 0			17 oran g/bu lan	3.158.802.78 6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah		87,5 0	20.000.000			87,7 5	21.897.644
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		17 oran g	20.000.000			17 oran g	12.250.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		100 %	207.000.000			100 %	395.894.734
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	15.000.000			1 paket	22.050.774
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	68.000.000			2 paket	226.838.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan bahan logistik kantor		12 paket	30.000.000			12 paket	42.876.505
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	20.000.000			2 paket	12.250.430
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 doku men	4.000.000			12 doku men	12.250.430
	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket Bahan/material yang disediakan		2 paket	30.000.000			2 paket	24.500.860
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 lapor an	50.000.000			12 lapor an	55.126.935
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		100 %	10.000.000			100 %	11.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 paket	10.000.000			2 paket	11.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan		100 %	91.404.480			100 %	65.454.047
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 lapor an	78.000.000			24 lapor an	49.032.983

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	13.404.480			12 laporan	16.421.064
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100 %	100.225.520			100 %	133.652.191
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3 unit	42.900.000			3 unit	57.699.525
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	37.325.520			3 unit	60.027.107
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	20.000.000			10 unit	15.925.559
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Ke c. Pungging	100 %	40.000.000			100 %	55.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		850 Pelayanan	40.000.000			900 Pelayanan	55.000.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		7 laporan	40.000.000			7 laporan	40.230790
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Ke c. Pungging	100 %	245.400.000			100 %	400.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		23 Fasilitasi	245.400.000			23 Fasilitasi	400.000.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka		8 dokumen	40.000.000			8 dokumen	81.402.390

		Administrasi Tata Pemerintahan Desa							
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 doku men	30.000.000			5 doku men	53.842.935
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 doku men	50.400.000			5 doku men	67.377.365
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		5 doku men	125.000.000			5 doku men	197.373.310
	JUMLAH				2.911.595.000				4.267.452.693

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah

ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN PUNGGING
KABUPATEN MOJOKERTO

NAMA SKPD : KECAMATAN PUNGGING

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	B	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81	Kec. Pungging	2.626.195.000	-	0	-	0	-
					Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 Inovasi	Kec. Pungging	0	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai sesuai Target		100%	Kec. Pungging	15.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 dokum	Kec.	7.500.000	-	0	-	0	-

						en	Pungging							
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21 Laporan	Kec. Pungging	7.500.000	-	0	-	0	-	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	93,18 %	Kec. Pungging	2.177.565.000						
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 orang/bulan	Kec. Pungging	2.177.565.000	-	0	-	0	-	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		L	IP ASN Perangkat Daerah	87,50	Kec. Pungging	20.000.000	-	0	-	0	-	
	7.01.01.2.05.01	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi		L	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 orang	Kec. Pungging	20.000.000	-	0	-	0	-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		L	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	100%	Kec. Pungging	207.000.000	-	0	-	0	-	

	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		L	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Pungging	15.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2 paket	Kec. Pungging	68.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		L	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 paket	Kec. Pungging	30.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	Kec. Pungging	20.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		L	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		12 dokumen	Kec. Pungging	4.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material		L	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		2 paket	Kec. Pungging	30.000.000	-	0	-	0	-

	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 laporan	Kec. Pungging	50.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan		100%		10.000.000					
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 paket		10.000.000					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai Kebutuhan		100%	Kec. Pungging	91.404.480	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		24 laporan	Kec. Pungging	78.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan	Kec. Pungging	13.404.480	-	0	-	0	-

	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		L	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		100%	Kec. Pungging	100.225.520	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		L	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		3 unit	Kec. Pungging	42.900.000	-	0	-	0	-
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	Kec. Pungging	37.325.520	-	0	-	0	-
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 unit	Kec. Pungging	20.000.000	-		-		
	7.01.02.2.04.01	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		L	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan		100%	Kec. Pungging	40.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		L	Jumlah Pelayanan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		850 Pelayan nan	Kec. Pungging	40.000.000	-	0	-	0	-

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperijinan		L	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		7 laporan	Kec. Pungging	40.000.000	-	0	-	0	-
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti		100%	Kec. Pungging	245.400.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		L	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		23 Fasilitasi	Kec. Pungging	245.400.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		L	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 dokumen	Kec. Pungging	40.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		L	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 dokumen	Kec. Pungging	30.000.000	-	0	-	0	-
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		L	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 dokumen	Kec. Pungging	50.400.000	-	0	-	0	-

	7.01.06.2.01 .12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		L	Jumlah Dokumen fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan		5 dokumen	Kec. Pungging	125.000.000	-	0	-	0	-
		JUMLAH							2.911.595.000					

(Sumber : Data Kec. Pungging Tahun 2024)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) OPD Kecamatan Pungging merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Pungging selama jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan tahun 2024, sebagai dasar dan referensi untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA OPD) dalam rangka hal tersebut Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Renja Kecamatan Pungging ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Pungging, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

